

Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

Astellia Vanindya Sheren¹, Annisa Hangesti Prihaningrum², Beryl Shira Filiandri³,
Risma Tria Syahrani⁴, Tauran⁵, Wilda Sumarsyah⁶

¹²³⁴⁵⁶*Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Negeri Surabaya*

Email: 24040674214@mhs.unesa.ac.id¹, 24040674247@mhs.unesa.ac.id²,
24040674253@mhs.unesa.ac.id³, 24040674222@mhs.unesa.ac.id⁴, tauran@unesa.ac.id⁵,
wildasumarsyah@unesa.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya menggunakan kriteria evaluasi OECD Development Assistance Committee (OECD-DAC) yang meliputi enam dimensi: relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis evaluasi on-going, yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengelola program KIP-K di tingkat universitas serta mahasiswa penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KIP-K memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dibuktikan dengan besarnya jumlah pengusul bantuan dibandingkan kuota yang tersedia. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima yang mencapai sekitar 30%, keterlambatan pencairan bantuan, belum terintegrasinya sistem informasi antara unit pengelola, serta keterbatasan sumber daya manusia. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan studi, motivasi akademik, dan kondisi sosial mahasiswa penerima, namun keberlanjutannya masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola, validasi data, transparansi informasi, dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem verifikasi data, penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola program, serta evaluasi program secara berkala dan menyeluruh.

Kata Kunci: KIP-K, evaluasi program, OECD-DAC, akses pendidikan tinggi, Universitas Negeri Surabaya

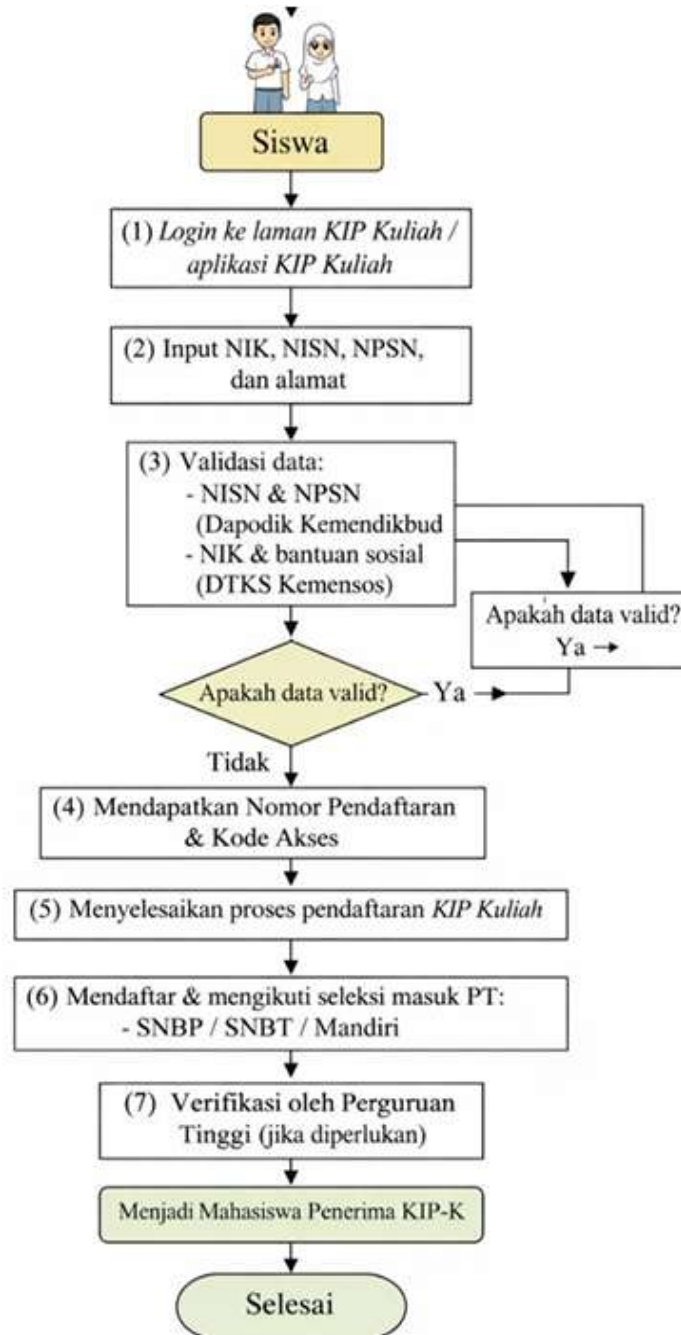
PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, pola pikir, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas individu serta berkontribusi terhadap perekonomian, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Febriyanti & Umar, 2025). Sejalan dengan pentingnya peran pendidikan tersebut, upaya peningkatan akses pendidikan juga merupakan bagian dari agenda pembangunan global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas (*Quality*

Education). Tujuan ini menekankan pentingnya menjamin akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Selain itu, peningkatan akses pendidikan tinggi juga berkontribusi terhadap tujuan pertama (*No Poverty*) dan tujuan kesepuluh (*Reduced Inequalities*), karena pendidikan menjadi salah satu instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial. Penyelenggaraan program pendidikan, termasuk bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tidak hanya berkontribusi pada pembangunan nasional tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Pentingnya pendidikan tersebut telah ditegaskan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta Pasal 12 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga menekankan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan tinggi menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia.

Namun, dalam realitasnya akses terhadap pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, masih belum merata. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat adalah kondisi ekonomi masyarakat. Keterbatasan kemampuan finansial menyebabkan sebagian lulusan pendidikan menengah tidak dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sebagaimana faktor ekonomi keluarga menjadi determinan utama dalam keputusan melanjutkan pendidikan tinggi (Purnamasari & Ardiansyah, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hak memperoleh pendidikan dengan kondisi nyata di lapangan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data kemiskinan nasional yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25% atau sekitar 23,36 juta jiwa. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi pada tahun 2025 berada pada kisaran 32,89%, yang menunjukkan bahwa masih banyak penduduk usia kuliah yang belum mengakses pendidikan tinggi. Jika ditarik pada level regional, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar juga menghadapi kondisi serupa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada Maret 2025 sebesar 9,50% dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 3,876 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan yang signifikan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi lemah. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Program Indonesia Pintar. Kemudian dikembangkan menjadi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang diimplementasikan sejak tahun 2020 sebagai transformasi dari program Bidikmisi yang telah ada sejak tahun 2010. Untuk memberikan

gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan Program KIP-K, berikut disajikan alur pendaftaran KIP Kuliah.



Gambar 1. Alur Pendaftaran Program KIP Kuliah

Sumber: Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah, Puslapdik (2021)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik mahasiswa, serta menjamin keberlangsungan studi hingga selesai tepat waktu. Bantuan yang diberikan dalam program ini meliputi biaya pendidikan (Uang Kuliah Tunggal/UKT) serta bantuan biaya hidup yang diberikan secara berkala setiap semester. Pelaksanaan program KIP-K berada di bawah tanggung jawab

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Dalam implementasinya, program ini didelegasikan kepada perguruan tinggi sebagai pelaksana teknis, termasuk Universitas Negeri Surabaya. Kelompok sasaran program ini adalah mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang memiliki potensi akademik baik. Adapun stakeholder yang terlibat dalam program ini meliputi pemerintah pusat, perguruan tinggi, mahasiswa penerima, serta masyarakat sebagai pengawas eksternal.

Sumber pendanaan program KIP-K berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Besaran bantuan yang diberikan kepada mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk biaya pendidikan maupun biaya hidup yang didasarkan pada indeks wilayah masing-masing perguruan tinggi. Meskipun program KIP-K telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan dana, serta kurang optimalnya penyampaian informasi kepada mahasiswa (Sariri & Prabawati, 2024). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program KIP-K secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi OECD *Development Assistance Committee* (OECD-DAC) 2019 yang meliputi *relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, dan sustainability*. Kriteria evaluasi tersebut digunakan karena mampu memberikan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap suatu program, tidak hanya pada aspek pelaksanaan, tetapi juga pada tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dampak yang dihasilkan, serta keberlanjutan manfaat program dalam jangka panjang. Melalui pendekatan ini, evaluasi Program KIP-K dapat dianalisis berdasarkan kesesuaian program dengan kebutuhan mahasiswa kurang mampu, efektivitas program dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi, efisiensi proses pelaksanaan dan pelayanan, dampak program terhadap keberlangsungan studi mahasiswa, serta keberlanjutan manfaat program di masa mendatang. Dengan demikian, penggunaan kriteria evaluasi OECD-DAC diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pelaksanaan Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu menggali fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan perspektif informan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap dinamika pelaksanaan program di lapangan. Adapun jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi *on-going*, yakni evaluasi yang dilakukan pada saat program masih berlangsung sehingga memungkinkan peneliti untuk memantau secara langsung proses implementasi program. Jenis evaluasi ini termasuk dalam kategori evaluasi formatif yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana program dijalankan, termasuk prosedur, mekanisme, serta interaksi antar pihak yang terlibat.

Dalam menilai pelaksanaan program secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi OECD *Development Assistance Committee* (OECD-DAC) tahun 2019 yang mencakup enam dimensi penilaian. Dimensi pertama adalah relevansi, yang digunakan untuk menilai kesesuaian program dengan kebutuhan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dimensi kedua adalah koherensi, yang menilai keselarasan program dengan kebijakan pendidikan tinggi dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dimensi ketiga adalah efektivitas, yang mengukur sejauh mana tujuan program dapat tercapai. Dimensi keempat adalah efisiensi, yang mengevaluasi penggunaan sumber daya, waktu, dan mekanisme pelaksanaan program. Dimensi kelima adalah dampak, yang menilai perubahan kondisi pendidikan, sosial, dan ekonomi yang dirasakan mahasiswa penerima bantuan. Dimensi keenam adalah keberlanjutan, yang menilai sejauh mana manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program KIP-K, meliputi pengelola program di tingkat universitas seperti Direktur Kemahasiswaan, staf bagian kemahasiswaan, dan admin pengelola beasiswa, serta mahasiswa penerima bantuan KIP-K sebagai kelompok sasaran langsung program. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung, antara lain dokumen resmi seperti Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2022 dan Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah yang diterbitkan oleh Puslapdik, laporan dan data statistik dari Badan Pusat Statistik baik tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Timur, penelitian terdahulu yang relevan, serta sumber daring resmi seperti laman KIP Kuliah Kemendikbudristek dan portal beasiswa UNESA.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara yang digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari pengelola program, mahasiswa penerima, dan alumni KIP-K terkait seluruh dimensi OECD-DAC. Kedua, observasi non-partisipatif yang dilakukan untuk mengamati secara langsung mekanisme pelayanan administrasi, proses penyampaian informasi program, serta interaksi antara pengelola dan mahasiswa penerima bantuan. Ketiga, dokumentasi yang digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi, mencakup pedoman pelaksanaan program, data penerima bantuan, laporan pelaksanaan program, hingga tangkapan layar media sosial dan website resmi yang berkaitan dengan Program KIP-K.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses mengelompokkan dan memilah informasi berdasarkan enam kriteria OECD-DAC sekaligus mengeliminasi data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskriptif analitis untuk menggambarkan kondisi empiris pelaksanaan Program KIP-K di lapangan. Tahap ketiga adalah analisis data, yang dilakukan dengan membandingkan kondisi empiris pelaksanaan program dengan indikator pada masing-masing kriteria OECD-DAC guna mengidentifikasi tingkat keberhasilan maupun berbagai permasalahan yang ditemukan. Tahap keempat sekaligus terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan yang bersifat evaluatif mengenai kualitas

pelaksanaan Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas program ke depannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevance (Relevansi)

Kriteria relevansi dalam evaluasi OECD-DAC digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan dan desain program mampu menjawab kebutuhan penerima manfaat serta selaras dengan kebijakan yang berlaku. Relevansi Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya dilihat dari kesesuaian program terhadap kebutuhan mahasiswa kurang mampu, ketepatan desain bantuan, dan kemampuan program dalam menjawab persoalan akses pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, Program KIP-K memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup membantu mahasiswa mempertahankan keberlangsungan studi serta mengurangi hambatan ekonomi selama menjalani perkuliahan. Tingginya relevansi program juga terlihat dari besarnya jumlah pendaftar dibandingkan kuota penerima. Berdasarkan informasi resmi Universitas Negeri Surabaya, pada hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 terdapat sebanyak 6.509 calon mahasiswa baru yang diterima di Universitas Negeri Surabaya, dan sebanyak 1.293 mahasiswa di antaranya dinyatakan lolos jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Selain itu, Universitas Negeri Surabaya juga tercatat sebagai salah satu perguruan tinggi negeri dengan jumlah penerima KIP-K terbanyak pada jalur SNBT 2025, yaitu sebanyak 3.252 mahasiswa penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap bantuan pendidikan tinggi masih sangat tinggi sekaligus menunjukkan komitmen universitas dalam memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi kurang mampu.



Gambar 2. Daftar PTN penerima KIP Kuliah terbanyak jalur SNBT 2025

Sumber: SDGs Center Universitas Negeri Surabaya, 2025

Namun, tingginya jumlah pengusul bantuan juga menunjukkan bahwa kuota penerima Program KIP-K masih terbatas dibandingkan jumlah mahasiswa yang

mebutuhkan bantuan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, terdapat sekitar 3.000 mahasiswa yang mengajukan bantuan Program KIP-K, tetapi hanya sekitar 1.500 mahasiswa yang dapat diverifikasi dan menerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas bantuan yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh mahasiswa yang memenuhi kebutuhan ekonomi. Program KIP-K juga relevan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan pendidikan berkualitas (*quality education*). Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari kelompok ekonomi rendah untuk tetap mengakses pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya pendidikan yang tinggi.

Dari aspek desain program, Program KIP-K telah memiliki tujuan dan mekanisme bantuan yang jelas melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing daerah. Untuk wilayah Surabaya, bantuan biaya hidup diberikan sebesar Rp1.250.000 per bulan dan dicairkan setiap semester. Universitas Negeri Surabaya juga melakukan proses verifikasi dan survei lapangan guna memastikan bantuan diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Namun, relevansi program belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan penerima bantuan yang dinilai belum tepat sasaran akibat ketidaksesuaian data ekonomi maupun kondisi tempat tinggal penerima bantuan. Selain itu, mahasiswa masih mengalami kesulitan memperoleh informasi resmi terkait prosedur dan mekanisme Program KIP-K sehingga penyampaian informasi program belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Universitas Negeri Surabaya tetap melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi akademik dan ekonomi mahasiswa penerima bantuan guna memastikan bantuan diberikan sesuai ketentuan program. Secara keseluruhan, Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya telah menunjukkan tingkat relevansi yang baik karena mampu menjawab kebutuhan mahasiswa kurang mampu dan mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi. Namun, penguatan validasi data dan sistem informasi program masih diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Coherence (Koherensi)

Kriteria koherensi digunakan untuk menilai keselarasan pelaksanaan program dengan kebijakan, sistem, maupun aktor lain yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, koherensi Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya dianalisis melalui keterpaduan pelaksanaan program secara internal di lingkungan universitas serta hubungan program dengan kebijakan pemerintah pusat. Pelaksanaan Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya telah melibatkan koordinasi antarunit dalam mendukung keberlangsungan program. Pengelolaan program dilakukan melalui kerja sama antara Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, fakultas, serta pihak lain yang berperan dalam proses administrasi, pengawasan, dan evaluasi penerima bantuan. Koordinasi tersebut dilakukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Koherensi internal program juga terlihat dari adanya keterpaduan antara pengelolaan bantuan pendidikan dengan sistem akademik mahasiswa. Universitas Negeri Surabaya secara berkala melakukan evaluasi akademik mahasiswa penerima bantuan guna

memastikan mahasiswa tetap aktif dan memenuhi persyaratan program. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KIP-K tidak berjalan secara terpisah, tetapi terintegrasi dengan sistem pembinaan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan universitas. Dari aspek eksternal, Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya telah berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Pelaksanaan program juga menunjukkan adanya hubungan koordinatif antara perguruan tinggi dengan pemerintah pusat dalam proses evaluasi dan pengawasan program.



Gambar 3. Pertemuan Universitas Negeri Surabaya dan Komisi X DPR RI dalam pembahasan mekanisme penyaluran Program KIP-K

Sumber: Humas UNESA, 2025

Hal tersebut terlihat dari adanya pembahasan mengenai transparansi dan ketepatan sasaran Program KIP-K antara pihak universitas dengan Komisi X DPR RI. Dalam pembahasan tersebut, Universitas Negeri Surabaya menyampaikan berbagai kendala pelaksanaan program, termasuk tingginya jumlah pengusul dibandingkan kuota bantuan yang tersedia. Selain itu, Universitas Negeri Surabaya juga mendorong adanya sistem penyaluran bantuan yang lebih terstruktur dan selaras dengan proses penerimaan mahasiswa baru agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih sinkron. Hal ini menunjukkan adanya upaya perguruan tinggi dalam menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan di lapangan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait Program KIP-K.

Namun, koherensi program belum sepenuhnya optimal. Penyampaian informasi terkait Program KIP-K masih belum terintegrasi secara baik antar unit pelaksana sehingga mahasiswa terkadang mengalami kesulitan memperoleh informasi resmi mengenai prosedur administrasi maupun mekanisme program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi internal dalam sistem penyampaian informasi masih memerlukan penguatan

agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terstruktur dan konsisten. Secara keseluruhan, Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya telah menunjukkan koherensi yang cukup baik melalui adanya koordinasi internal antarunit dan keterkaitan program dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun, integrasi sistem informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program masih perlu diperkuat agar Program KIP-K dapat berjalan lebih harmonis dan terkoordinasi dengan baik.

Effectiveness (Efektivitas)

Kriteria efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya dianalisis berdasarkan kemampuan program dalam membantu mahasiswa kurang mampu memperoleh dan mempertahankan akses pendidikan tinggi. Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya telah cukup efektif dalam mendukung keberlangsungan pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan akademik selama menjalani perkuliahan sehingga mahasiswa dapat lebih fokus mengikuti proses pembelajaran tanpa terbebani masalah ekonomi. Efektivitas program juga terlihat dari keberlanjutan studi mahasiswa penerima bantuan. Program KIP-K membantu mahasiswa tetap melanjutkan pendidikan hingga semester berjalan serta mengurangi risiko mahasiswa menghentikan studi akibat keterbatasan biaya pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program telah mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi rendah. Selain membantu keberlangsungan studi, Program KIP-K juga memberikan dukungan terhadap aktivitas akademik mahasiswa. Bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa digunakan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, transportasi, konsumsi, hingga kebutuhan penunjang akademik lainnya. Dengan adanya bantuan tersebut, mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengikuti kegiatan akademik maupun pengembangan diri di lingkungan perguruan tinggi.



Gambar 4. Mahasiswa penerima Program KIP-K Universitas Negeri Surabaya yang berprestasi dalam kegiatan akademik dan nonakademik

Sumber: Instagram FORMADIKSI UNESA, 2026

Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Tingginya jumlah pengusul bantuan dibandingkan kuota penerima menyebabkan tidak seluruh mahasiswa yang memenuhi kriteria dapat memperoleh bantuan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas bantuan yang tersedia masih terbatas dibandingkan kebutuhan mahasiswa terhadap Program KIP-K. Selain itu, efektivitas program juga dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima bantuan. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan penerima bantuan yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi yang seharusnya menjadi prioritas program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil program belum sepenuhnya merata bagi seluruh kelompok mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas Program KIP-K juga dipengaruhi oleh beberapa kendala administratif dan pelayanan informasi. Mahasiswa masih mengalami kesulitan memperoleh informasi resmi terkait mekanisme program sehingga proses administrasi dan komunikasi program belum berjalan secara maksimal. Keterbatasan tenaga pengelola program juga mempengaruhi pelayanan dan pengawasan terhadap penerima bantuan. Meskipun demikian, Universitas Negeri Surabaya tetap melakukan evaluasi akademik dan evaluasi kondisi ekonomi mahasiswa penerima bantuan secara berkala guna memastikan bantuan tetap diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan program. Evaluasi tersebut menjadi upaya untuk menjaga keberhasilan pelaksanaan Program KIP-K agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Secara keseluruhan, Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam membantu mahasiswa kurang mampu memperoleh dan mempertahankan akses pendidikan tinggi. Namun, peningkatan ketepatan sasaran, optimalisasi pelayanan informasi, dan penguatan pengawasan program masih diperlukan agar efektivitas Program KIP-K dapat berjalan lebih maksimal dan merata.

Efficiency (Efisiensi)

Kriteria efisiensi digunakan untuk menilai sejauh mana sumber daya, waktu, dan mekanisme pelaksanaan program dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan program. Dalam penelitian ini, efisiensi Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya dianalisis melalui aspek pengelolaan administrasi, proses verifikasi penerima bantuan, serta ketepatan waktu pelaksanaan program. Pelaksanaan Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya telah memiliki mekanisme administrasi dan verifikasi yang cukup terstruktur. Proses seleksi penerima bantuan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dokumen dan survei lapangan guna memastikan kesesuaian kondisi ekonomi calon penerima bantuan. Mekanisme tersebut menjadi upaya universitas dalam menjaga kualitas penyaluran bantuan agar sesuai dengan tujuan program.

Dalam pelaksanaannya, proses verifikasi lapangan membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar karena pengelola program harus melakukan pengecekan kondisi ekonomi mahasiswa secara langsung. Tingginya jumlah pendaftar menyebabkan proses seleksi dan validasi data memerlukan ketelitian yang lebih tinggi agar bantuan dapat disalurkan secara tepat. Selain proses verifikasi, efisiensi program juga dipengaruhi oleh sistem administrasi dan pelayanan informasi. Mahasiswa masih mengalami kendala dalam memperoleh informasi resmi terkait prosedur administrasi maupun mekanisme pencairan bantuan.



Gambar 5. Saluran informasi Program KIP-K melalui media komunikasi FORMADIKSI Universitas Negeri Surabaya

Sumber: *Saluran Whatsapp FORMADIKSI UNESA*, 2026

Kondisi tersebut menyebabkan mahasiswa sering memperoleh informasi melalui pihak lain di luar pengelola resmi program sehingga proses penyampaian informasi belum berjalan secara efisien. Dari aspek ketepatan waktu, pelaksanaan Program KIP-K masih menghadapi hambatan administratif pada proses pencairan bantuan biaya hidup mahasiswa. Pencairan bantuan harus menyesuaikan validasi data akademik mahasiswa setiap semester sehingga proses penyaluran bantuan terkadang mengalami keterlambatan dibandingkan jadwal yang diharapkan mahasiswa penerima bantuan.

Meskipun demikian, Universitas Negeri Surabaya terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan Program KIP-K guna meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi hambatan operasional selama program berlangsung. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan program agar proses administrasi, verifikasi, dan penyaluran bantuan dapat berjalan lebih optimal. Secara keseluruhan, Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya telah memiliki mekanisme pelaksanaan yang cukup baik dalam mendukung penyaluran bantuan pendidikan. Namun, efisiensi program masih memerlukan penguatan pada aspek pelayanan informasi, ketepatan waktu pencairan bantuan, dan optimalisasi proses administrasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran.

Impact (Dampak)

Kriteria dampak digunakan untuk menilai perubahan yang ditimbulkan oleh suatu program, baik perubahan yang direncanakan maupun tidak direncanakan, terhadap penerima manfaat maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam penelitian ini, dampak Program KIPK di Universitas Negeri Surabaya dianalisis melalui perubahan kondisi pendidikan, sosial, dan ekonomi yang dirasakan mahasiswa penerima bantuan. Program KIP-K memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan pendidikan yang diberikan membantu mahasiswa tetap melanjutkan studi di perguruan tinggi serta mengurangi hambatan ekonomi yang sebelumnya menjadi kendala dalam mengakses pendidikan tinggi. Program ini juga memberikan rasa aman bagi mahasiswa dalam menjalani perkuliahan karena kebutuhan

dasar pendidikan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Selain pada aspek pendidikan, Program KIP-K juga memberikan dampak sosial bagi mahasiswa penerima bantuan. Mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti kegiatan organisasi, pengembangan diri, dan aktivitas akademik lainnya tanpa terlalu terbebani persoalan biaya pendidikan.



Gambar 6. Partisipasi mahasiswa penerima Program KIP-K dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk dampak sosial program

Sumber: *Instagram Formadiksi UNESA, 2023*

Kondisi tersebut mendorong peningkatan partisipasi mahasiswa dalam lingkungan kampus serta memperluas kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan diri. Dampak program juga dirasakan oleh keluarga penerima bantuan. Program KIP-K membantu mengurangi beban ekonomi orang tua dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi. Bagi sebagian keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, keberadaan Program KIP-K menjadi faktor penting yang memungkinkan anggota keluarga tetap dapat mengakses pendidikan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa penerima bantuan, tetapi juga oleh keluarga penerima manfaat secara lebih luas. Dalam jangka panjang, Program KIP-K turut mendorong perubahan pandangan masyarakat mengenai akses pendidikan tinggi. Kehadiran program menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi bukan lagi hambatan utama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini juga memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi yang lebih terbuka bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Namun demikian, pelaksanaan Program KIP-K masih menimbulkan beberapa dampak yang tidak diharapkan. Masih ditemukannya penerima bantuan yang dinilai belum tepat sasaran berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan mahasiswa yang lebih membutuhkan tetapi belum memperoleh bantuan pendidikan. Selain itu, keterbatasan kuota penerima bantuan menyebabkan masih terdapat mahasiswa yang memenuhi kriteria namun belum dapat dijangkau oleh program. Meskipun itu, Universitas Negeri Surabaya terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program KIP-K guna menjaga kualitas penyaluran bantuan serta meminimalkan berbagai dampak negatif yang muncul selama pelaksanaan program. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan manfaat program agar dampak positif Program KIP-K dapat dirasakan secara lebih luas dan merata. Secara keseluruhan, Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu serta membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima bantuan. Namun, penguatan pada aspek ketepatan sasaran dan perluasan jangkauan bantuan masih diperlukan agar dampak positif program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Sustainability (Keberlanjutan)

Kriteria keberlanjutan digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat suatu program dapat terus dirasakan dalam jangka panjang, termasuk kemampuan program dalam mempertahankan pelaksanaan, pengelolaan, dan kualitas manfaat bagi penerima bantuan. Dalam penelitian ini, keberlanjutan Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya dianalisis melalui keberlangsungan manfaat pendidikan, mekanisme evaluasi program, serta kesiapan sistem pendukung pelaksanaan program. Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya menunjukkan keberlanjutan manfaat yang cukup baik bagi mahasiswa penerima bantuan. Bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup membantu mahasiswa mempertahankan keberlangsungan studi hingga semester berjalan sehingga mahasiswa memiliki peluang yang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Program ini juga memberikan dukungan jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Keberlanjutan program turut didukung oleh adanya evaluasi berkala terhadap mahasiswa penerima bantuan. Universitas Negeri Surabaya melakukan pemantauan kondisi akademik dan administrasi mahasiswa setiap semester guna memastikan penerima bantuan masih memenuhi ketentuan program. Mekanisme evaluasi tersebut menunjukkan adanya upaya institusi dalam menjaga kualitas pelaksanaan dan keberlangsungan Program KIP-K. Selain itu, tingginya minat masyarakat terhadap Program KIP-K menunjukkan bahwa program masih menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program KIP-K memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi dan masih relevan untuk dilanjutkan pada masa mendatang.

Namun, keberlanjutan program masih menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan kapasitas bantuan menyebabkan belum seluruh mahasiswa yang memenuhi kriteria dapat memperoleh Program KIP-K. Selain itu, pelaksanaan program juga masih menghadapi kendala pada aspek administrasi dan penyampaian informasi yang berpotensi

mempengaruhi kualitas layanan program dalam jangka panjang. Di sisi lain, ketepatan sasaran penerima bantuan juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Apabila penyaluran bantuan tidak dilakukan secara tepat, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan Program KIP-K. Oleh karena itu, penguatan sistem verifikasi dan validasi data penerima bantuan menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan dan kredibilitas program.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Universitas Negeri Surabaya terus melakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program KIP-K guna meningkatkan kualitas pengelolaan program. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat Program KIP-K dapat terus dirasakan oleh mahasiswa penerima bantuan secara berkelanjutan dan lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, Program KIP-K di Universitas Negeri Surabaya memiliki tingkat keberlanjutan yang cukup baik karena mampu mendukung keberlangsungan pendidikan mahasiswa kurang mampu dalam jangka panjang. Namun demikian, penguatan pada aspek pengelolaan administrasi, ketepatan sasaran penerima bantuan, dan kualitas pelayanan informasi masih diperlukan agar keberlanjutan Program KIP-K dapat berjalan lebih optimal dan konsisten di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya secara umum telah menunjukkan peran penting dalam mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Ditinjau berdasarkan kriteria evaluasi OECD-DAC, program ini memiliki relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan yang cukup baik karena mampu membantu mahasiswa mempertahankan keberlangsungan studi melalui bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup. Program KIP-K juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi, pengurangan beban ekonomi keluarga, serta peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun pengembangan diri.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KIP-K masih menghadapi berbagai kendala implementasi, seperti keterbatasan kuota penerima bantuan, belum optimalnya sistem informasi dan pelayanan administrasi, keterlambatan penyampaian informasi dan pencairan bantuan, serta masih ditemukannya penerima bantuan yang dinilai belum tepat sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama program tidak hanya terletak pada perluasan jangkauan bantuan, tetapi juga pada penguatan tata kelola program agar pelaksanaan bantuan menjadi lebih transparan, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Universitas Negeri Surabaya perlu memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan melalui integrasi data ekonomi, survei lapangan yang lebih terstruktur, serta evaluasi berkala terhadap kondisi mahasiswa penerima bantuan. Selain itu, pengelola program perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui sistem informasi yang lebih terintegrasi, transparan, dan mudah diakses mahasiswa. Penguatan sumber daya manusia pengelola program, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat juga diperlukan agar pelaksanaan Program KIP-K dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya

perbaikan tersebut, Program KIP-K diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal, merata, dan berkelanjutan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, Juli 25). Persentase penduduk miskin Jawa Timur Maret 2025 turun menjadi 9,50 persen dibandingkan September 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1536/persentase-penduduk-miskinjawa-timur-maret-2025-turun-menjadi-9-50-persen-dibandingkan-september2024.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menurut jenis <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NiMy/angkapartisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026, Februari 5). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskinseptember-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>
- Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*.
- Febriyanti, I., & Umar, N. F. (2025). Peran Pemerintah dalam Mendorong Kualitas Pendidikan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Sosio E-Kons*, 17(3), 230237. <https://doi.org/10.30998/1kbev249>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>
- OECD. (2019). *Better criteria for better evaluation: Revised evaluation criteria definitions and principles for use*. OECD Publishing.
- Paselle, E., & Mutia. (2021). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. PT. Nas Media Indonesia.
- Pratistha, B., & Triharjanto, R. H. (2020). Evaluasi On Going Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016–2040. *Jurnal Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa*, 1(1), 36-49. <http://doi.org/10.30536/jkkpa.v1n1.3>
- Purnamasari, G. N., & Ardiansyah, H. (2025). Kajian Literatur tentang Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Minat Siswa Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan* <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28051>
- Tambusai, 9(2), 15674–15685. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Pedoman pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2021*. Jakarta: Kemendikbud.
- Putri, F., & Zakir, S. (2023). Mengukur Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran: Telaah Evaluasi Formatif Dan Sumatif Dalam Kurikulum Merdeka. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(4), 172-180. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i4.1783>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.go.id>

- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. <https://peraturan.go.id>
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p238-251>
- Sistem Informasi 238-251. Beasiswa Universitas Negeri Surabaya (SIABAS UNESA). <https://beasiswa.unesa.ac.id/>
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25-32.
- Wirawan, W. (2011). *Evaluasi teori, model, standar, aplikasi dan profesi*. PT. RajaGrafindo Persada.